BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan pemberian kredit, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Keberadaan perjanjian baku dalam masyarakat sudah sangat melekat, terutama bagi para pelaku usaha. Dengan adanya perjanjian baku pelaku usaha dapat menghemat waktu dan melaksanakan perjanjian secara efisien.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum dari keberadaan perjanjian baku. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, maka perjanjian dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Kredit menjadi salah satu sarana bagi masyarakat yang tidak mempunyai cukup modal untuk menjalankan usahanya. Sehingga kredit berfungsi untuk

menumbuhkan rasa antara kedua belah pihak untuk saling tolong-menolong dengan mencapai kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, atau masyarakat membawa pengaruh yang sangat baik. Dengan adanya pemberian pinjaman dana usaha yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerja sama dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang maka akan sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman modal UKM untuk menjalankan usahanya.

Pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang melakukan kerjasama dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang dalam melakukan pemberian modal usaha kepada para pelaku usaha. Bagi para calon konsumen yang akan meminjam dana kredit usaha pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Dengan adanya standar operasional prosedur pinjaman penguatan modal bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mengajukan pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro. Konsumen harus menyerahkan data lengkap ke kecamatan dari masing-masing kelurahan. Dari kecamatan akan diperiksa lengkap dan dibuatkan

rekomendasi Camat lalu diserahkan ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.⁶⁶

Setelah data konsumen tersebut masuk ke pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, maka selanjutnya pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang akan meng-check list kelengkapan berkas calon penerima kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk selanjutnya diserahkan ke Bank BPR Palembang. Apabila berkas tersebut sudah diverifikasi oleh Bank BPR Palembang maka selanjutnya bank akan mensurvei calon penerima kredit UKM dengan melalui mekanisme untuk layak tidaknya diberikan pinjaman.

Setelah disetujui dan dinyatakan layak oleh pihak Bank BPR Palembang untuk menerima pinjaman modal usaha tersebut, maka calon konsumen tersebut akan dipanggil untuk pencairan dana pinjaman dan secara langsung melakukan perjanjian yang sudah dibuat dan ditentukan oleh Bank BPR Palembang yang bekerja sama dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

Jika suatu saat terdapat konsumen yang *complain* mengenai isi dari kontrak baku tersebut, maka konsumen tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas atau melakukan tawar menawar mengenai isi

---

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Yenny, selaku Kasi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Tanggal 3 Maret 2020.

perjanjian/kontrak baku tersebut karena sudah menjadi ketetapan dari pihak Bank BPR Palembang. Dalam hal ini para konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi kontrak baku/perjanjian yang ditetapkan sepihak oleh pihak Bank BPR Palembang secara keseluruhan atau secara utuh. Apabila konsumen tidak menerima ketentuan yang ada dari isi kontrak baku tersebut, maka konsumen cukup membatalkannya saja, artinya transaksi pinjam meminjam dana UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tidak dilakukan.⁶⁷

Praktiknya dalam perjanjian kredit, kedudukan kreditur dan debitur tidak pernah seimbang. Kedudukan kreditur lebih kuat dibandingkan dengan calon debitur. Padahal dengan dipenuhinya asas-asas perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak akan dapat mencapai keadilan, jika para pihak memiliki posisi tawar menawar yang seimbang. Posisi tawar yang tidak seimbang akan terjadi apabila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya pada pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah akan mengikuti saja apa yang menjadi ketentuan atau syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya.

Suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang sudah tercetak dalam bentuk

---

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Yenny, selaku Kasi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Tanggal 3 Maret 2020.

formulir, yang ketika ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam isi perjanjiannya, dimana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai atau hanya sedikit kesepakatan untuk menegosiasi isi perjanjian yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku sangat berat sebelah.

Kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang yaitu pihak pembuat perjanjian biasanya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hal ekonomi dan politik. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada pada perjanjian kredit tersebut bertujuan untuk melindungi pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerja sama dengan pihak Bank BPR Palembang agar tidak terjadi suatu kemungkinan yang dapat merugikan pihak bank, misalnya terjadi kredit macet.⁶⁸

Jika suatu saat pihak konsumen mengalami kredit macet atau penundaan dalam pembayaran dengan tempo waktu yang telah ditentukan maka pihak bank BPR Palembang tidak akan memberikan konsekuensi atau denda terhadap konsumen tersebut namun pihak bank

---

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Yenny, selaku Kasi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Tanggal 3 Maret 2020.

akan langsung memblack-list pihak konsumen yang tidak dapat membayar pinjaman tersebut sehingga pihak konsumen akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit atau pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya di kemudian hari.⁶⁹

Penggunaan perjanjian baku dalam pemberian fasilitas kredit dalam dunia perbankan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi, karena tidak mungkin bila kreditur harus melakukan negosiasi tentang substansi perjanjian dengan setiap orang yang akan menjadi debitur. Di samping banyak menguras tenaga dan pikiran juga akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan akan menjadi kesulitan tersendiri dalam administrasi maupun dalam pelaksanaan perjanjiannya.⁷⁰

Permasalahan yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut terdapat pada isi dari perjanjiannya. Dikarenakan perjanjian baku merupakan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak dalam hal ini pelaku usaha, maka pelaku usaha mungkin saja memanfaatkan klausula yang ada di dalamnya untuk digunakan pelaku usaha dalam melepaskan tanggung jawab bahkan mengalihkan

---

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Nain selaku Auditor pada Bank BPR Palembang, Tanggal 9 Maret 2020.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Nain selaku Auditor pada Bank BPR Palembang, Tanggal 9 Maret 2020.

tanggung jawab kepada konsumen. Hal ini yang menjadi salah satu pemicu adanya pertanyaan penggunaan perjanjian baku dalam usaha dan bisnis. Apabila konsumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup dan mengerti isi dari perjanjian baku yang diberikan pelaku usaha, maka dapat menimbulkan kerugian tersendiri bagi konsumen. Bahkan, sebagian besar masyarakat tidak membaca secara teliti terlebih dahulu suatu perjanjian baku sebelum ditandatangani atau disahkan. Hal inilah yang memicu penyalahgunaan atau kesewenangan pelaku usaha dalam membuat isi perjanjian baku.

Berkaitan dengan hal ini, dimana dalam proses pembuatan perjanjian kredit UKM sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh pihak kreditur dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu pelayan terhadap debitur. Selain daripada itu alasan Bank BPR Palembang mencantumkan klausul baku tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, investasi dari Bank BPR Palembang terhadap kemungkinan wanprestasi atau bahkan kerugian yang dengan sengaja dibuat oleh calon debitur. Tidak ada larangan untuk membuat perjanjian baku selama tidak bertentangan dengan undang-undang, namun apabila dalam perjanjian baku tersebut terdapat klausul-klausul yang bertentangan dengan undang-undang maka perjanjian itu dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Selain dari pada itu, penulis juga mewawancarai 5 orang dari konsumen yang menerima pinjaman kredit usaha yang terdata pada pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tentang tahu atau tidaknya konsumen terhadap isi perjanjian kredit baku tersebut. Namun berbeda halnya dengan tanggapan para konsumen mengenai kontrak baku tersebut, yang mana dari hasil persentase terhadap 5 orang konsumen UMKM hanya 2 orang saja yang tahu tentang isi kontrak baku tersebut. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai isi/klausul yang terdapat dalam kontrak baku.

Konsumen yang tidak paham mengenai isi dari perjanjian baku tersebut, hanya dapat menyetujui dengan menandatangani kontrak baku tersebut tanpa memahami atau membacanya terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa dalam praktik ternyata kegiatan transaksi kredit dalam kontrak baku dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran etika yang dapat merugikan pihak lain, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam pembuatan kontrak baku tersebut. Apalagi pihak yang berkedudukan lemah dan tidak paham sama sekali mengenai perjanjian baku akan sangat mempengaruhi pihak tersebut apabila suatu saat terdapat hal-hal yang memberatkannya.

Berikut ini rincian beberapa tanggapan dari para konsumen UMKM mengenai perjanjian kontrak baku dalam pemberian kredit usaha kecil dan menengah (UKM), antara lain dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Tanggapan Para Konsumen UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tentang Kontrak Baku Yang Tertera Pada Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM

No.	Nama Konsumen UMKM	Tanggapan Para Konsumen UMKM
1.	Misro	Bapak Misro, mengemukakan bahwa salah satu syarat disetujui atau tidaknya perjanjian tersebut yaitu dengan menandatangani surat perjanjiannya. Karena poin-poin yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut sangatlah banyak, apalagi kami yang belum mengetahui sepenuhnya tentang perjanjian baku. Hanya poin-poin penting saja yang dijelaskan ketika awal akad berlangsung, seperti jumlah uang yang harus dibayar

		perbulan, barang yang dijadikan jaminan apabila pinjaman tersebut jumlahnya banyak, serta jangka tempo waktu pembayaran yang harus dilunasi.
2.	Amma	Ibu Amma juga mengatakan hal yang sama demikian, bahwa dalam perjanjian baku tidak ada tawar-menawar atau negosiasi sama sekali karena klausul-klausul atau isi perjanjian sudah ditentukan oleh pihak yang membuat perjanjian tersebut. Karena kebutuhan modal usaha, kami hanya menandatangani perjanjian tersebut tanpa adanya proses tawar-menawar di awal akad perjanjian.
3.	H. Makruf	Bapak H. Makruf, mengatakan bahwa tidak terdapat konsekuensi atau denda yang diterima jika suatu saat telah jatuh tempo belum membayar uang pinjaman. Pembayaran perbulan tetap bisa dilakukan pada bulan selanjutnya

		tanpa denda yang diterima. Namun jika pihak Bank BPR Palembang tidak teliti dalam mensurvei data atau tempat konsumen sebelum pencairan dana, maka Pihak Bank BPR Palembang suatu saat akan sangat dirugikan bila terjadi kredit macet. Pihak Bank BPR Palembang akan langsung memblack-list para konsumen yang mengalami kredit macet tersebut sehingga para konsumen suatu saat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kredit dari bank dan lembaga keuangan kedepannya.
4.	Syarifuddin	Bapak Syarifuddin mengatakan bahwa sebelum perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM ditandatangani, saya membacanya dan meneliti isi perjanjiannya terlebih dulu. Karena ketika saya tidak memahami atau ada poin dari isi perjanjian tersebut yang masih belum jelas dapat langsung

		ditanyakan pada pihak Bank BPR Palembang, sehingga jika suatu saat terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap isi perjanjiannya saya dapat menunjukkan salinan dari perjanjian kredit baku yang masing-masing dipegang oleh pihak konsumen sebagai bukti jika suatu saat terjadi sengketa.
5.	Siti Badriyah	Ibu Siti Badriyah mengemukakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara baku telah ditentukan isi perjanjiannya secara menyeluruh oleh salah satu pihak yaitu pihak kreditur (pihak Bank). Pihak konsumen hanya melakukan tanda tangan diatas perjanjian tersebut jika pihak konsumen telah dinyatakan setuju dan sepakat terhadap isi perjanjiannya. Menurut saya tidak terdapat hal-hal yang memberatkan bagi konsumen di dalam perjanjian baku tersebut, apalagi dana UKM ini sangat

		membantu bagi para konsumen yang belum/kekurangan dana untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya pinjaman dana UKM melalui pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerja sama dengan Bank BPR Palembang ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman dana UKM.

Kredit pembiayaan UMKM pada Pemberdayaan Usaha Mikro di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerja sama dengan pihak Bank BPR Palembang bersama Pemerintah Kota Palembang yang turut serta membangun perekonomian kerakyatan segmen usaha untuk UKM, bertujuan untuk orang-orang yang memiliki usaha namun tidak memiliki cukup modal sehingga timbul lah kredit ini untuk membantu orang-orang dalam memberikan pinjaman modal usaha.⁷¹

Kredit jenis ini memiliki kriteria yang harus dipenuhi bagi debitur dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan yang telah ditentukan Dinas Koperasi dan

---

⁷¹ Hasil wawancara dengan Nor, Tanggal 27 Januari 2020

UKM Kota Palembang yaitu KTP suami istri bagi yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga dengan usia minimal 17 Tahun dan maksimal 45 Tahun, serta menyertakan Kartu Keluarga (KK), Akte nikah/cerai, rekening listrik, rekomendasi Camat, surat keterangan usaha dari kelurahan, aplikasi kredit, pas foto warna ukuran 3x4 dua lembar, dan foto usaha.⁷²

Jenis usaha yang bisa mendapatkan pinjaman dana UKM harus sudah berjalan minimal 1 (satu) Tahun dan mendapat surat keterangan usaha dari Camat. Jika suatu saat pihak Bank BPR Palembang saat mensurvei tempat usaha calon konsumen namun menemukan data yang tidak sesuai maka calon konsumen dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan modal pinjaman UKM dari Bank BPR Palembang dan tidak termasuk menjadi anggota binaan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin meningkat ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang simple, efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui perjanjian baku. Dengan perjanjian baku ini, pelaku bisnis terutama produsen (*kreditur*) telah menyiapkan klausul-klausul baku yang dituangkan dalam

---

⁷² Hasil wawancara dengan Yenny, selaku Kasi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Tanggal 3 Maret 2020.

suatu kontrak tertentu. Pihak debitur tinggal membaca isi perjanjian baku tersebut dengan pilihan *take it or leave it*, sehingga kesempatan untuk bernegosiasi tidak ada sama sekali.⁷³

Praktiknya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan dibuat secara tertulis, maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila suatu saat terjadi sengketa. Dalam undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu.

Dengan mencermati dari beberapa informasi diatas bahwa dalam pembuatan perjanjian kredit UKM dilakukan dengan cara yang sederhana, hal tersebut dilakukan karena tidak ada pedoman secara khusus dalam pembuatan kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang. Di samping itu juga dalam pembuatan perjanjian lebih efisien dan efektif.

---

⁷³ Hasil wawancara dengan Nain selaku Auditor pada Bank BPR Palembang, Tanggal 9 Maret 2020.

B. Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

Dalam transaksi, perjanjian merupakan kunci utama, tanpa adanya perjanjian maka transaksinya diragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar berhati-hati dan mesti membuat perjanjian dari setiap transaksi yang mereka laksanakan antara sesama manusia.

Perjanjian akan mengikat kedua belah pihak yang masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut. Kredit pembiayaan UMKM sebagai satu bentuk perjanjian pinjam meminjam uang dalam bentuk modal untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha.

Akad dalam Muamalah memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan. Kehalalan dan keharaman sesuatu antara lain ditentukan oleh *akad*. Demikian pula Riba dan tidak Ribanya antara transaksi,

juga ditentukan oleh *akad* yang dilakukan. Karena itu konsekuensi *akad* dalam Bank Syariah *duniawi* dan *ukhrawi*.⁷⁴ *Akad* adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa Az-Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah “segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).⁷⁵

Ada banyak cara seseorang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah pinjam meminjam dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam. Pinjam meminjam modal usaha juga termasuk dalam kerjasama tolong menolong (*syirkah ta'awunyah*) dan merupakan hal yang wajar dilakukan di kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan pinjam meminjam tersebut harus berpegang pada prinsip-prinsip *muamalah* agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan suatu maksud dapat tercapai dengan baik. Prinsip-prinsip *muamalah* tersebut adalah :⁷⁶

---

⁷⁴ Didi Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.65

⁷⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005, hlm.48

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.15-16

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* hukumnya adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur-unsur paksaan.
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari *kemudharatan* dalam kehidupan masyarakat.
4. *Muamalah* bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Disamping itu dalil diatas dapat memotivasi untuk melakukan kerjasama dalam mengembangkan usaha, tanpa adanya penghianatan dari salah satu atau kedua pihak, karena di dalamnya terdapat tolong-menolong. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya. Begitu juga kerjasama yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dengan Bank BPR Palembang dalam

memberikan bantuan pinjaman modal usaha kepada para konsumen UKM.

Praktiknya dalam setiap perjanjian agar berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang sesuai dengan syariat Islam, maka dalam setiap perjanjian harus memenuhi semua asas-asas Hukum Ekonomi Syariah. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa asas-asas Hukum Ekonomi Syariah sangat diperlukan sebagai tumpuan dan landasan berpikir atau sebagai prinsip dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Dalam praktik di lapangannya menjelaskan dari ketujuh asas Hukum Ekonomi Syariah akan dijelaskan satu persatu, yaitu :

1. Asas Ilahiah

Asas ilahiah yaitu suatu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya. Allah yang menentukan rezeki untuk setiap makhluk-Nya dan membimbing setiap insan menuju kesuksesan. Dalam praktiknya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerjasama dengan Bank BPR Palembang telah memenuhi asas ini dalam memberikan bantuan dana kredit UKM kepada calon konsumen, dikarenakan dalam akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang

ditetapkan oleh syara'. Dalam pembuatan perjanjian kredit baku yang telah dibuat oleh pihak kreditur telah mencantumkan kalimat "Basmallah" sebagai pembuka dari isi perjanjiannya, hal ini dikarenakan dalam melakukan perikatan harus sesuai dengan nilai-nilai tauhid. Sehingga para pihak yang berakad tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Tauhid menjadi titik tolak dalam berakad, menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir meraih ridha Allah. Oleh karenanya, manusia yang berasas ilahiah dalam berbagai aktifitasnya tidak akan sembarangan dan melampaui batas karena mesti menyelaraskan diri dengan ketetapan Allah.

2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan perjanjian kredit baku tersebut masih belum menerapkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini mengakibatkan salah satu pihak tidak ikut andil dalam pembuatan perjanjian kredit baku melainkan perjanjian kredit hanya dibuat oleh salah satu pihak saja, yaitu pihak kreditur. Padahal para pihak yang melakukan akad harus memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-

persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi perselisihan.

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Namun dalam praktik di lapangan, asas persamaan dan kesetaraan ini masih belum diterapkan dalam proses pembuatan perjanjian kredit baku. Hal ini berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak, karena salah satu pihak yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit mengakibatkan salah satu pihak tersebut tidak diperlakukan sama. Artinya, pihak yang membuat perjanjian (kreditur) berkedudukan lebih kuat dibandingkan pihak kedua (debitur). Asas persamaan ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perjanjian dan menentukan isi di dalam perjanjian tersebut. Hal ini juga bertujuan agar tidak ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

4. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Berdasarkan praktik di lapangan, asas keadilan masih belum diterapkan dalam pembuatan perjanjian kredit baku tersebut. Sehingga salah satu pihak yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tidak diperlakukan secara adil atau salah satu pihak merasa berat sebelah. Seharusnya dalam suatu perikatan, para pihak yang melakukan akad harus diperlakukan secara adil. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya.

5. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Para pihak yang melakukan perikatan harus berlandaskan atas dasar suka sama suka atau sukarela, tidak boleh ada paksaan atau unsur penipuan di dalamnya. Dalam praktiknya sendiri, asas kerelaan telah diterapkan dalam perjanjian baku ini, yaitu para pihak yang melakukan akad telah saling rela terhadap perjanjian yang dilakukan. Jika salah satu pihak terdapat unsur tidak rela maka perjanjian tersebut tidak dapat diteruskan karena akan menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak tersebut.

6. Asas Kejujuran atau Kebenaran (*As-Shidiq*)

Para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini berarti dalam mengungkapkan transaksi apa adanya tanpa ada rekayasa dan penipuan. Selain itu, transaksi perjanjian kredit tersebut harus mengandung manfaat bagi para pihak. Asas kejujuran dan kebenaran ini dalam praktiknya di lapangan telah diterapkan oleh masing-masing pihak yang berakad, yaitu pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerjasama dengan Bank BPR Palembang beserta calon konsumen UKM dalam menerima bantuan kredit dana UKM.

7. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Dalam suatu perjanjian dianjurkan untuk dilakukan secara tertulis, hal ini dapat menjadi jaminan atau sebagai bukti jika suatu saat terjadi perselisihan terhadap keduanya. Hal ini juga untuk menegakkan kemaslahatan dan menghindari adanya unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya dikemudian hari. Dalam praktiknya sendiri, perjanjian kredit UKM ini sudah dibuat secara tertulis sehingga asas tertulis ini telah diterapkan atau telah terpenuhi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik di lapangan pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang bekerjasama dengan Bank BPR Palembang dalam memberikan bantuan kredit UKM kepada calon konsumen masih belum menerapkan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah sepenuhnya, yaitu asas kebebasan, asas persamaan/kesetaraan dan asas keadilan. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.

Menurut Fathurrahman Djamil, mengemukakan bahwa “syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.”⁷⁷ Asas ini didasarkan kepada sejumlah ayat Al-Qur’an Al-Hijr (15): 29

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Artinya : *Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke*

---

⁷⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), hlm.26

dalamnya roh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Tafsir dari surat Al-Hijr ayat 29 diatas menjelaskan bahwa (*Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya*) telah merampungkan bentuknya (*dan Aku telah meniupkan*) maksudnya telah mengalirkan (*ke dalam tubuhnya roh ciptaan-Ku*) sehingga ia menjadi hidup; diidhafatkannya lafal ruuh kepada-Nya sebagai penghormatan kepada Adam (*maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud*) yaitu sujud penghormatan dengan cara membungkuk.⁷⁸

Dalam bidang muamalat ini terdapat kaidah fikih yang berisikan bahwa “asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁷⁹ Kaidah fikih ini bersumber pada dua Hadist Nabi Muhammad SAW berikut ini :⁸⁰

1. *HR. al-Bazar dan at-Thabrani*

“Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang di diamkan dimaafkan. Maka,

---

⁷⁸ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.105

⁷⁹ Imam Masbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Cet.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.270

⁸⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Isam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), hlm.26-27

terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun”.

2. *HR. Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi*

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia; dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia; dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kamu pertengkarkan dia; dan Allah telah mendiamkan beberapa hal sebagai tanda kasihnya kepadamu, Dia tidak lupa, maka janganlah kamu perbincangkan dia”.

Isi kaidah fikih tersebut menunjukkan, bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau *mubah* dilakukan. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya.

Perjanjian yang dilahirkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*Al-Hurriyah*) seharusnya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak kontrak di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negoisasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu

telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian disodorkan kepada pihak yang lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang lainnya untuk melakukan negoisasi atas syarat-syarat yang telah dibakukan itu.

Dengan tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak itu membuktikan bahwa dalam praktiknya tidak terdapat keadilan bagi salah satu pihaknya yaitu pihak debitur. Hal ini sesuai dengan asas persamaan (*Al-Musawah*) dan asas keadilan (*Al-Adalah*) di dalam perjanjian. Asas persamaan ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perjanjian dan menentukan isi di dalam perjanjian tersebut.

Dalam Islam, adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur'an. Bersikap adil sering kali Allah tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa. Asas keadilan (*Al-Adalah*) menjadi salah satu tumpuan atau landasan berpikir dalam melaksanakan suatu perjanjian, dalam arti kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi

harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret.

Allah SWT telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan individu yang lainnya. Hal ini juga diatur dalam ajaran Islam, dimana seseorang itu tidak diperbolehkan memberatkan kepada yang lainnya, maksudnya seseorang itu tidak boleh melakukan kezaliman kepada yang lainnya. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan anti kezaliman.

Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Hadid (57): 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ

Artinya : *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya*

padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Tafsir surat Al-Hadid ayat 25 diatas menjelaskan bahwa (وَالْمِيزَانَ) “*Dan neraca*”, yang dimaksud adalah keadilan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mujahid, Qatadah dan lainnya. Kitab dan neraca keadilan itulah yang merupakan sumber kebenaran yang diakui oleh akal yang sehat lagi lurus. Dan lawannya adalah berbagai pendapat serta pandangan yang tidak benar. Karena itulah dalam surat ini Allah berfirman, (لِيُقِيمُوا بِالْقِسْطِ) “*Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*” Yang dimaksud dengan melaksanakan kebenaran dan keadilan adalah membenarkan berita yang dibawa para Rasul dan menaati semua perintah yang mereka sampaikan. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh para Rasul itu adalah kebenaran yang mutlak. Tidak ada lagi kebenaran setelah itu.⁸¹

Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Adapun dasar hukum lainnya yang

---

⁸¹ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.794-795

menjelaskan tentang keadilan bagi para pihak yang melakukan perikatan. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. An-Nahl (16): 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.*

Tafsir surat An-Nahl ayat 90 diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk selalu bersikap adil dan memotivasi mereka untuk berbuat baik. Firman Allah (وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ) “Dan memberi kepada kaum kerabat” maksudnya adalah Allah SWT memerintahkan untuk menjalin silaturrahim. Selanjutnya (وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) “Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran (melakukan perbuatan yang diharamkan secara terang-terangan).” Lafazh الْفَحْشَاءِ artinya hal-hal yang diharamkan (baik yang dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan). Sedangkan الْمُنْكَرِ adalah

perbuatan haram yang dilakukan secara terang-terangan.⁸²

Sikap adil harus tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebut juga dengan *kedzaliman*. Beberapa hal yang termasuk dalam *kedzaliman*, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan dzalim lainnya.

---

⁸² Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.242